



Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Muhammad Ernanda Pramadhika, Ernady Syaodih*

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/08/2022

Revised : 15/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 139 - 146

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Pembangunan Rendah Karbon merupakan salah satu konsep yang muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya kenaikan suhu global. Konsep ini muncul sejak di adakannya Perjanjian Paris. Di Indonesia konsep ini diratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Meskipun begitu dukungan dari pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan konsep ini khususnya di Kecamatan Coblong masih kurang. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan mencoba mengidentifikasi sudah sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mendukung konsep ini di Kecamatan Coblong didasarkan kepada 6 indikator yang meliputi (1) Pola penggunaan energi, (2) Kehidupan sosial, (3) Emisi karbon dan lingkungan, (4) Mobilitas publik, (5) Pengelolaan sampah, (6) Pengelolaan air dan limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung terhadap implementasi pembangunan rendah karbon. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan rendah karbon yang dilakukan pemerintah Kota Bandung belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari masih adanya cukup banyak masalah pada setiap variabel dari pembangunan rendah karbon.

Kata Kunci : Pembangunan Rendah Karbon; Kecamatan Coblong; Kota Bandung

ABSTRACT

Low Carbon Development is one of the concepts from Paris Agreement that has emerged as a form of concern for the increasing of global temperature. In Indonesia this concept is ratified into Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change. However, the support from the Bandung City government to implement this concept, especially in Coblong District, is still lacking. Therefore, in this study, the author will try to identify the success rate of the Bandung City government in implementing this concept in Coblong District based on 6 indicators which include (1) Patterns of energy use, (2) Social life, (3) Carbon emissions and the environment, (4) Public mobility, (5) Waste management, (6) Water and waste management. The purpose is to identify the extent of the Bandung city government's performance level towards the implementation of low-carbon development. This research uses a qualitative descriptive approach method using data triangulation. The result of this study is that the low-carbon development carried out by the Bandung City government has not been good enough. This is seen from the fact that there are still quite a lot of problems in every variable of low-carbon development.

Keywords : Low Carbon Development; Coblong District; Bandung City

© 2022 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Saat ini semakin jelas bahwa dunia menghadapi tantangan besar dalam degradasi lingkungan global dan perubahan iklim [1]. Perubahan iklim adalah salah satu dari banyak fenomena alam akibat degradasi lingkungan yang dapat dirasakan manusia secara langsung, salah satunya melalui peningkatan temperatur bumi (2).

Kota-kota memainkan peran penting dalam sistem iklim dan energi berkelanjutan. Konsumsi energi kota, bersamaan dengan perubahan guna lahan dan kebutuhan akan makanan dan sumber daya lainnya menyebabkan besarnya emisi gas rumah kaca global (GRK), berbagai upaya muncul pada kota-kota di seluruh dunia untuk beralih ke pola pembangunan dengan lebih sedikit energi dan lebih sedikit karbon salah satunya yaitu pembangunan rendah karbon (3).

Pembangunan Rendah Karbon adalah adalah pola baru dalam pembangunan baik secara politis dan ekonomis yang bertujuan mengurangi emisi CO₂ dan mencapai pembangunan berkelanjutan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat (4). Pembangunan Rendah Karbon merupakan penurunan dari Paris Agreement atau Persetujuan Paris yang dibuat untuk untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat masa pra-industrialisasi dan mengupayakan menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi (5). Persetujuan Paris sendiri sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia Melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Pembangunan rendah karbon selaras dengan salah satu misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 khususnya pada misi nomor 4. Misi nomor 4 dari RPJMD Kota Bandung yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Meskipun sudah tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 namun dalam realitanya pembangunan Kota Bandung masih kurang sesuai dengan konsep pembangunan rendah karbon. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah seperti Sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah, Tingginya tingkat alih fungsi lahan, Rendahnya kualitas udara dan sungai, Frekuensi dan intensitas banjir yang semakin tinggi, Rendahnya kualitas udara, Kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas, serta belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Kecamatan Coblong menjadi salah satu wilayah di Kota Bandung yang mengalami permasalahan yang sudah dituliskan diatas. Untuk lebih spesifiknya masalah-masalah yang terdapat di Kecamatan Coblong diantaranya kurangnya luas RTH yang tersedia, rendahnya kualitas udara dan sungai, belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur khususnya transportasi, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, dan sistem pengelolaan limbah yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian untuk menilai kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mendukung Pembangunan Rendah Karbon di Kecamatan Coblong.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai “Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon” dengan studi kasus Kecamatan Coblong. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat kinerja pemerintah dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Kecamatan Coblong.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka [6]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif [7].

Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Variabel Penelitian

No.	Indikator	Variabel
1	Pola Penggunaan Energi	Proporsi penggunaan energi baru dan terbarukan Konsumsi Energi
2	Kehidupan Sosial	Proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah Kepadatan penduduk
3	Emisi Karbon & Lingkungan	Emisi CO/kapita Emisi NO2/kapita Tingkat SO2 harian Tingkat <i>suspended particulate matter</i> harian
4	Mobilitas Publik	Bus umum per kapita Panjang transportasi rel/kapita Kendaraan pribadi/kapita
5	Pengelolaan Sampah	Timbulan sampah per kapita Jumlah sampah yang diambil dan dikelola dengan baik Besaran sampah yang di daur ulang
6	Pengelolaan Air & Limbah	Besaran air limbah yang terkelola Konsumsi air bersih harian Timbulan air limbah

C. Hasil dan Pembahasan

Program Pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan Rendah Karbon

Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan program terkait pembangunan rendah karbon di Kecamatan Coblong maka dilakukan perbandingan antara program-program terkait yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung dalam dokumen perencanaan dengan wawancara pada OPD serta dokumentasi hasil observasi untuk melihat seperti apa implementasi program-program terkait pembangunan rendah karbon di lapangan.

Berikut adalah program-program terkait dengan pembangunan rendah karbon yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui dokumen perencanaan berupa rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) organisasi perangkat daerah (OPD).

Tabel 2. Program OPD Kota Bandung Terkait Pembangunan Rendah Karbon

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
		Meningkatnya Kualitas Air Bersih	Indeks Kualitas Air Bersih
		Terjaganya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah	Cakupan Pengurangan Sampah Cakupan Penanganan Sampah
2	Dinas Perhubungan	Meningkatnya manajemen kebutuhan lalu lintas	Rasio Pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja
3	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung	Meningkatnya Tata Ruang Yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

Untuk wawancara penyebutan masing-masing sampel narasumber yang diwawancarai akan dilakukan melalui kodefikasi untuk mempermudah pembacaan. Berikut daftar kode, nama dan jabatan serta OPD apa saja yang menjadi narasumber dalam wawancara terkait pembangunan rendah karbon.

Tabel 3. Kodefikasi Narasumber Wawancara

Kode	Nama	OPD/Jabatan
II	Irene Irmamurti, ST., MT.	DLHK (Kepala Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup)
RA	Roni Achmad Kurnia, ST.	Dishub (Kepala Sub-bagian Program, Data, dan Informasi)
JM	Jakaria Munajat, ST.	Disciptabintar (Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan)
EW	Elis Wartini	Kecamatan Coblong (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial)
YN	Yunita	Kecamatan Coblong (Staff Ekonomi dan Pembangunan)

Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Pola Penggunaan Energi

Pola energi di Kecamatan Coblong masih menggunakan sumber energi dari sumber konvensional, hal ini diperburuk dengan belum adanya program mengenai pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan di dokumen perencanaan OPD Kota Bandung. Bangunan-bangunan di Kecamatan Coblong belum ada yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti energi matahari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari YN selaku Staff Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Coblong.

“Listrik di wilayah Kecamatan Coblong masih menggunakan listrik konvensional yang berasal dari grid PLN, sejauh ini belum ada pengembangan mengenai penggunaan energi terbarukan.”

Pernyataan tersebut selaras dengan kondisi dimana tidak adanya penggunaan energi alternatif khususnya pada gedung-gedung yang berada di Kecamatan Coblong. Selain itu energi alternatif juga belum digunakan pada penerangan jalan umum yang ada di Kecamatan Coblong.

Pada variabel penghematan energi sudah mulai dilakukan di Kecamatan Coblong. Penghematan energi dilakukan oleh pihak kecamatan dengan cara mengajak masyarakat tidak menyalakan peralatan listrik yang tidak diperlukan, seperti tidak menyalakan lampu di siang hari.

Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Kehidupan Sosial

Pada indikator kehidupan sosial pada pembangunan rendah karbon, salah satu hal yang menjadi komponen utama adalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan data yang tersedia jumlah RTH di Kecamatan Coblong hanya sebesar 2 persen dari total luas kecamatan yaitu seluas 153.322 m².

Dalam mensiasati hal tersebut, pihak kecamatan mengajak warga untuk menanam tanaman dirumahnya, dengan begitu maka ruang hijau yang ada di Kecamatan dapat bertambah tanpa menambah RTH yang baru dikarenakan terbatasnya lahan yang tersedia di kecamatan. Meskipun begitu berdasarkan keterangan EW kondisi RTH di Kecamatan Coblong cukup baik hal ini dikarenakan selalu adanya perawatan yang rutin dilakukan agar RTH tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Pada komponen kepadatan penduduk, Kecamatan Coblong memiliki sebesar 14.853 jiwa/km² atau kurang lebih sekitar 149 jiwa/ha. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, jumlah tersebut masih termasuk kedalam kategori kepadatan rendah karena jumlahnya <150 jiwa/ha. Oleh karena itu secara umum Kecamatan Coblong masih sangat nyaman untuk dijadikan tempat tinggal[8].

Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Emisi Karbon dan Lingkungan

Emisi karbon yang terdapat di Kecamatan Coblong dapat dikatakan masih memenuhi standar kualitas udara yang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran Emisi CO, Emisi NO₂, Emisi SO₂, dan Tingkat *Suspended Particulate Matter* harian secara umum di Kota Bandungsudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata bulanan Index Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Air Quality Monitoring System (AQMS) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada indikator-indikator tersebut selalu berada pada skor dibawah 50 poin yang artinya kualitas udara sudah baik [9].

Pada tingkat kecamatan sebagian besar polusi berasal dari kendaraan bermotor. Pada umumnya polusi yang ada ditingkat kecamatan masih dalam kondisi yang relatif aman, akan tetapi pada hari-hari tertentu terutama diakhir pekan polusi di Kecamatan Coblong dapat meningkat cukup tinggi dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung dengan membawa kendaraan pribadinya. Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Coblong.

“Untuk polusi kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor karena di Kecamatan Coblong tidak ada industri yang menghasilkan polusi, hanya ada industri tekstil yang polusi udaranya relative sedikit. Penanaman tanaman di median ataupun di bahu jalan menjadi solusi yang dilakukan untuk mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor di Kecamatan Coblong.”

Disepanjang ruas jalan yang berada di Kecamatan Coblong khususnya di Jl. Ir. H. Djuanda dan Jl. Tamansari yang menjadi jalan utama memang banyak ditanam tanaman sebagai salah satu cara mereduksi polusi yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor sekaligus sebagai penghijauan ditengah keterbatasan lahan.

Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Mobilitas Publik

Mobilitas publik mayoritas didominasi oleh kendaraan bermotor pribadi. Transportasi publik yang tersedia hanya angkot dan bus umum. Untuk jumlah bus umum jumlahnya dapat dikatakan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selain rute yang tersedia masih kurang fleksibel sehingga banyak warga yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Pengembangan bus umum juga masih sulit untuk dilakukan karena masih sering terjadinya konflik dengan para supir angkot yang takut para penggunanya beralih menggunakan bus umum. Meskipun begitu Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah cukup tegas dalam melakukan pengawasan uji KIR untuk bus umum, selain itu sudah ada rencana untuk menggunakan bis listrik yang lebih ramah lingkungan akan tetapi untuk pelaksanaannya sendiri saat ini masih terhalang oleh regulasi.

Dalam indikator panjang transportasi rel/kapita untuk saat ini Kota Bandung belum memiliki transportasi umum dalam kota yang berbasis rel, akan tetapi sebenarnya Kota Bandung telah memiliki rencana untuk membangun transportasi umum berbasis rel yang tercantum dalam dokumen *Bandung Urban Mobility Project* [10]. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan memiliki rencana untuk membangun moda transportasi umum berbasis rel berupa *light railway transit/monorail* dengan panjang lintasan sekitar 10,147 km yang terdiri dari 16 stasiun untuk koridor I dan koridor II sepanjang 20,050 km yang terdiri dari 21 stasiun.

Dari 16 stasiun yang terdapat di koridor I terdapat 4 stasiun yang berada di Kecamatan Coblong yaitu Babakan Siliwangi, Simpang Dago, Unpad, dan Panatayuda. Rencana pembangunan ini didasari oleh tingginya potensi penumpang yang berkisar antara 9.975-33.581 penumpang per hari. Akan tetapi rencana ini sepertinya akan sulit terealisasi dikarenakan besarnya investasi yang diperlukan, untuk membangun koridor I diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp2.279.225.000.000 dan untuk membangun koridor II diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp3.556.900.000.000. Hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan dari RA sebagai Kepala Sub-bagian Program, Data, dan Informasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

“Untuk pembangunan transportasi berbasis rel cukup sulit terealisasi dikarenakan apabila mengandalkan anggaran dari APBD Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat cukup terbatas, selain itu pemerintah tidak bisa melakukan investasi dengan skema Government to Business karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Apabila pembangunan transportasi berbasis rel tetap dilakukan maka kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintah akan sangat besar, sehingga bila pembangunan tetap dipaksakan hasilnya akan menjadi kurang efektif.”

Pada tingkat Kecamatan meskipun terdapat angkot dan bus umum yang trayeknya melewati Kecamatan Coblong, sebagian besar masyarakat masih menggunakan kendaraan bermotor pribadinya untuk bepergian. Untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pihak kecamatan sendiri memberi anjuran kepada masyarakat untuk berjalan kaki atau bersepeda apabila tempat yang dituju relatif dekat atau menggunakan transportasi umum apabila jaraknya relatif jauh.

Pada komponen kendaraan pribadi per kapita, kendaraan yang ada pada wilayah Kecamatan Coblong pada tahun 2020 kurang lebih berjumlah 73.304 yang terdiri dari 53.166 kendaraan roda dua dan 20.138 kendaraan roda empat, dengan begitu maka terdapat 0,66 kendaraan pribadi/kapita di Kecamatan Coblong. Jumlah tersebut masih pada jumlah yang sedikit, akan tetapi apabila jumlahnya bertambah dengan cepat hal tersebut dapat meningkatkan polusi di Kecamatan Coblong[8].

Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Pengelolaan Sampah

Pada variabel besaran sampah yang di daur ulang pemerintah Kecamatan Coblong sudah menerapkan kebijakan 3R (reuse, reduce, recycle) yang diadaptasi oleh pemerintah Kota Bandung menjadi program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), hal ini ditandai dengan adanya tempat sampah yang memisahkan beberapa jenis sampah yang berbeda yang tersebar di wilayah kecamatan. Selain itu tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang melayani Kecamatan Coblong yaitu TPS Tamansari juga sudah menerapkan 3R hal ini ditandai dengan adanya pengumpulan sampah terpisah yang dilakukan di TPS tersebut. Akan tetapi jumlah sampah yang dibuang oleh masyarakat masih cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan YN pengelolaan sampah di Kecamatan Coblong dilakukan secara berkala dimana sampah diambil dari rumah-rumah oleh petugas kebersihan kurang lebih 3 hari sekali, selain itu ada pula bank sampah sudah tersebar di seluruh Kelurahan yang berada di Kecamatan Coblong, dengan adanya bank sampah maka pengumpulan sampah akan terpusat dengan baik sehingga bisa dengan mudah diolah atau dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, seperti misalkan sampah organik menjadi pupuk kompos dan biogas, sedangkan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan.

Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Pengelolaan Air dan Limbah

Sumber air bersih di Kecamatan Coblong berasal dari sumur bor dan juga PDAM. Selain itu penggunaan sumur resapan sebagai salah satu sumber air bersih selain PDAM juga digunakan di semua Kelurahan sebagaimana diutarakan oleh YN.

“Sumber air bersih di Kecamatan Coblong sebagian besar berasal dari PDAM dan penggunaan sumur bor, akan tetapi ada juga sumur resapan meskipun penggunaannya masih belum banyak sehingga lebih menjadi sumber air cadangan.”

Kecamatan Coblong juga banyak membuat lubang biopori sebagai area resapan air. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menanggulangi kurangnya resapan air ke dalam tanah karena banyaknya lahan yang memiliki pekerasan beton atau material lain yang tidak dapat ditembus air. Untuk penghematan air, pihak kecamatan juga sudah menganjurkan warganya untuk menggunakan air seperlunya agar cadangan air kota tetap tersedia setiap saat. Hal tersebut mengingat Kecamatan Coblong merupakan daerah yang berada pada daerah yang relatif tinggi dan memiliki beberapa mata air serta sungai yang menjadi sumber air Kota Bandung.

Limbah rumah tangga masih menjadi permasalahan di Kecamatan Coblong, permasalahannya yaitu masih banyak masyarakat yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu sehingga mencemari dan mengotori sungai yang berdampak pada kotornya kualitas air sungai. Beberapa solusi sudah dilakukan dan diterapkan baik oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Kelurahan terkait, seperti dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengangkutan sampah berkala, sosialisasi terkait bahaya membuang sampah dan limbah ke sungai, namun sebagian masyarakat masih sering membuang limbah ke sungai ini masih belum bisa teratasi dengan baik, akan tetapi adanya program pembangunan IPAL Komunal untuk seluruh kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung secara bertahap diharapkan dapat membantu mengurangi pencemaran limbah rumah tangga seperti yang diutarakan oleh YN.

“Masyarakat masih banyak yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah dirumahnya sehingga limbah rumah tangganya langsung dibuang ke sungai dan membuat sungai tercemar, dari Kecamatan, Kelurahan, dan gerakan Citarum Harum. Meskipun begitu pemerintah Kota Bandung sedang melakukan pembangunan IPAL Komunal di setiap kelurahan secara bertahap sehingga kedepannya kemungkinan pencemaran dari limbah rumah tangga dapat berkurang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder di Kecamatan Coblong, untuk industri di Kecamatan Coblong tidak ada yang menjadi kendala untuk lingkungan karena tidak ada industri besar yang berdampak terhadap lingkungan, adapun untuk industri tekstil di Kelurahan Cihampelas sudah mempunyai sarana untuk pengolahan limbah sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pembangunan rendah karbon masih kurang baik. Hal tersebut dilihat dari masih adanya cukup banyak kekurangan dari kinerja instansi yang berada pada lingkup pemerintahan Kota Bandung dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Kecamatan Coblong beberapa diantaranya yaitu :

Pada indikator pola energi, penggunaan serta pengembangan energi baru dan terbarukan belum dilakukan dikarenakan tidak adanya program mengenai hal tersebut pada dokumen pembangunan OPD Kota Bandung.

Pada indikator kehidupan sosial, luasan RTH di Kecamatan Coblong masih sangat sedikit yaitu hanya 2,10% dari total luas kecamatan.

Pada indikator emisi karbon dan lingkungan, konsentrasi, gas berbahaya dapat meningkat di waktu-waktu tertentu sebagai akibat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi.

Pada indikator mobilitas publik, kualitas dari transportasi umum yang tersedia di Kota Bandung masih kurang baik, hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Selain itu belum adanya transportasi berbasis rel mengakibatkan opsi transportasi umum menjadi terbatas.

Pada indikator pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dibuang oleh warga di Kecamatan Coblong masih cukup banyak.

Pada indikator pengelolaan air dan limbah, masih banyak warga yang membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai maupun saluran air. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya sistem pengelolaan limbah di rumah-rumah warga.

Daftar Pustaka

- [1] J. Nordensvard, *Low carbon development Its social implications and challenges*, no. June. 2018. doi: 10.4324/9781315817422.
- [2] O. Marselita, L. Alvia, and E. Evana, “Environmental Performance, Carbon Emission Disclosure, and Carbon Emission Intensity on Cost of Equity Capital: An Empirical Study in Indonesia,” *J. Ind. Distrib. Bus.*, vol. 12, no. 11, pp. 9–16, 2021.
- [3] G. Ohshita, Stephanie., Zhou, N., Price, L., Fridley, D., Khanna, N., Hong, L.X., Lu, H.Y., Fino-Chen, C., He, “Low Carbon Development for Cities : Methods and Measures,” *Handb. Clean Energy Syst.*, 2015.
- [4] H. Yuan, P. Zhou, and D. Zhou, “What is low-carbon development? A conceptual analysis,” *Energy Procedia*, vol. 5, pp. 1706–1712, 2011, doi: 10.1016/j.egypro.2011.03.290.
- [5] Bappenas, “Strategi Implementasi NDC,” pp. 1–76, 2017.
- [6] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta, 2010.
- [7] Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Citapustaka Media, 2012.

- [8] BPS BANDUNG, “Kecamatan Coblong Dalam Angka 2021,” 2021. Accessed: Dec. 18, 2022. [Online]. Available: <https://bandungkota.bps.go.id/publication/2021/09/24/1721dbfb016033240eb1ef4d/kecamatan-coblong-dalam-angka-2021.html>
- [9] “(LKIP),” 2020.
- [10] Dinas Perhubungan Bandung, “Bandung Mobility,” *Bandung Urban Mobil. Proj.*, no. 205, 2016.